

## Diskon Akhir Tahun di Pusat Perbelanjaan

Pengunjung memilih sepatu yang dijual di Kuningan City Mall, Jakarta, Senin (26/12). Sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta menawarkan diskon atau potongan harga barang hingga 80 persen pada akhir tahun 2022 untuk menarik minat konsumen.



# BTPN dan SMBC Beri Pembiayaan Hijau Rp1,46 Triliun kepada PLN

“Kami berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan berkelanjutan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” kata Nathan Christianto.

JAKARTA (IM) - PT Bank BTPN Tbk dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sepakat untuk memberikan pembiayaan hijau senilai US\$93,75 juta atau Rp1,46 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari pinjaman sindikasi yang bernilai total US\$750 juta yang di tandatangani bersama oleh para kreditur dan PLN pada Jumat (23/12), dengan Bank BTPN dan SMBC bersama-sama berperan sebagai *coordinating mandated lead arranger and bookrunner*, serta *green loan coordinator*.

Dalam keterangan di Jakarta, Senin (26/12), disebutkan bahwa BTPN dan SMBC memberikan fasilitas pembiayaan hijau tersebut untuk mendukung aktivitas PLN dalam upaya transisi energi menuju energi terbarukan.

“Kami berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan berkelanjutan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” kata Nathan Christianto.

Nathan menjelaskan, pihaknya mendesain produk pembiayaan hijau itu salah satunya untuk nasabah korporasi yang mendukung keberlanjutan, termasuk melalui proyek energi terbarukan guna bersama-sama mencapai emisi nol bersih.

Di luar pinjaman sindikasi itu, BTPN telah menyalurkan pinjaman untuk kegiatan berwawasan lingkungan menurut definisi Otonitas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp6,7 triliun per akhir September 2022, naik 52 persen dari Rp4,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Selain sektor energi terbarukan, BTPN juga mendesain produk pembiayaan hijau untuk sektor transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam hayati

dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, efisiensi energi, serta bangunan berwawasan lingkungan.

Pada 2021, BTPN memberikan pembiayaan hijau sebesar Rp1,06 triliun kepada PT Kepland Investama untuk pembiayaan kembali kembali kredit yang digunakan untuk pembangunan International Financial Centre (IFC), Tower 2 di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta.

Inisiatif Bank BTPN dalam menyalurkan pinjaman hijau berlandaskan pada dua hal, yaitu program SMBC “Roadmap Addressing Climate Change” dan POJK

No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

“Roadmap Addressing Climate Change” merupakan komitmen SMBC, sebagai salah satu anggota Aliansi Perbankan Nol Bersih (Net-Zero Banking Alliance), untuk menyalurkan portofolio pinjaman dan investasinya dengan rencana nol emisi pada 2050.

SMBC juga berkomitmen untuk mencapai nol bersih melalui operasinya secara grup pada 2030, yang salah satu misinya adalah menyalurkan

pembiayaan berkelanjutan yang ditargetkan mencapai 30 triliun Yen pada 2030.

“Sejalan dengan komitmen tersebut, kami berharap penyaluran pembiayaan hijau yang dilakukan Bank BTPN dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. Dengan potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh, pembiayaan hijau merupakan salah satu aspek pendanaan terpenting guna menciptakan ekonomi berkelanjutan yang kian jadi tuntutan,” kata Nathan. ● **hen**

## PT PII Luncurkan Program CSR Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

JAKARTA (IM) - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII yang merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Program Pemberdayaan Ekonomi untuk masyarakat desa. Program tersebut berkolaborasi dengan Rumah Zakat yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Desa Berdaya Karangmukti, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan Desa Berdaya Manggungsari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Seremonial Program CSR Desa Berdaya dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri oleh EVP Corporate Secretary & Communication PT PII Yunan Novaris yang mewakili Direktur Utama PT PII, Camat Bungursari Drs. Wawan Darmawan, M.Si, Pjs. Kepala Desa Manggungsari Eko Basuki, dan CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha, Jumat (23/12) lalu.

Yunan Novaris dalam keterangannya menyampaikan bahwa program CSR ini merupakan bentuk komitmen PT PII dalam

mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya di area-area terkait dengan proyek infrastruktur yang didukung oleh perusahaan.

“Kehadiran kami bukan hanya mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di daerah-daerah, namun juga kami berupaya untuk mengoptimalkan dampak sosial dan ekonomi di setiap area proyek yang kami dukung, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk terus mengembangkan UMKM dengan memanfaatkan sumber daya lokal daerah,” kata Yunan dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (26/12).

Program CSR yang dilakukan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Berdaya Karangmukti, Purwakarta melalui pemberdayaan perempuan pada usaha UMKM bidang agro ternak domba dan kuliner makanan basah. Sementara itu, di Desa Berdaya Manggungsari, Kabupaten Kendal dukungan diberikan dalam bentuk pemberian fasilitas mesin penggiling untuk kebutuhan UMKM petani beras.

Pj Kepala Desa Mangungsari Eko Basuki seba-

gai perwakilan pemerintah setempat menyambut bahagia bantuan yang diberikan oleh PT PII tersebut.

“Kami merasa bahagia dengan adanya program ini. Semoga harapannya desa kami lebih berdaya dengan hadirnya program CSR dari PT PII,” ujar Eko.

Rumah Zakat juga menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat desa.

“Kami bersyukur dengan adanya kolaborasi ini. Semoga dengan program yang *support* oleh PT PII dapat menciptakan kemandirian masyarakat di Desa Berdaya Karangmukti, Purwakarta dan Desa Berdaya Manggungsari, Kabupaten Kendal. Terima kasih PT PII,” kata Irvan.

Desa berdaya merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat desa melalui aktivitas pembinaan dan pendampingan secara berkala yang mendorong ke arah kemandirian warga, *capacity building*, dan ekonomi yang dihadirkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kehidupan masyarakat dalam bidang pembinaan dan ekonomi. ● **dro**

## LPEI Lepas Ekspor Perdana Produk Lidi UMKM ke India

JAKARTA (IM) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut melepas ekspor perdana 26 ton produk lidi berbahan baku nipah dan kelapa milik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) asal Banten, PT Hasil Alam Multipersada ke India dengan nilai US\$15.000.

Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Gerald Grisanto menuturkan bahwa pelepasan ekspor ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara LPEI dan Kementerian Keuangan Provinsi Banten berupa Coaching Program for New Exporter (CPNE) untuk meningkatkan ekspor.

“PT Hasil Alam Multipersada merupakan mitra binaan kami melalui program CPNE Provinsi Banten tahun 2022. Kami bangga telah berkontribusi terhadap kesuksesan berkat pelatihan dan pendampingan yang diberikan LPEI, produk lidi yang diproduksi mitra kami berhasil *go global*,” ujar Gerald sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, seperti dikutip Antara, Senin (26/12).

Dirintis sejak 2021, usaha yang dioperasikan oleh sepasang suami-istri ini memanfaatkan limbah nipah dan kelapa yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah untuk kemudian diolah menjadi produk lidi.

Dalam proses produksinya, PT Hasil Alam Multipersada saat ini memiliki 8 pengrajin yang mampu menghasilkan lidi dengan kapasitas produksi mencapai 60-40 ton tiap bulan.

Prestasi yang diraih oleh PT Hasil Alam Multipersada tak luput dari peran LPEI yang giat menyediakan pel-

atihan dan pendampingan teknis ekspor melalui program CPNE.

Dengan mengikuti program CPNE, PT Hasil Alam Multipersada dibekali dengan pengetahuan mengenai cara memproduksi barang berkualitas ekspor, manajemen ekspor, dan akses pasar hingga berujung pada keberhasilannya melakukan ekspor perdana.

Sepanjang 2022, LPEI telah memberikan pelatihan CPNE kepada 1.033 pelaku UMKM yang dilaksanakan baik secara *online*, *offline*, maupun *hybrid* di berbagai daerah di Indonesia.

Gerald menambahkan bahwa dalam rangka merealisasikan mandatnya untuk mendorong ekspor nasional, LPEI siap memfasilitasi pelaku usaha di Indonesia UMKM yang termotivasi untuk naik kelas dan bertransformasi menjadi handal, tangguh, dan siap bersaing di pasar global.

“Ke depan, LPEI akan terus mendampingi alumni peserta CPNE Banten lainnya sehingga tercipta semakin banyak eksportir baru di Provinsi Banten agar nantinya bisa berkontribusi dalam upaya peningkatan ekspor nasional,” jelas Gerald.

Selain program CPNE, LPEI juga memiliki program Desa Devisa yang merupakan program pelatihan yang diberikan kepada klaster penghasil komoditas unggulan yang memiliki potensi ekspor.



## PENGIRIMAN PAKET POS MENINGKAT JELANG TAHUN BARU

Petugas mendaftarkan dan menyortir paket barang kiriman sebelum didistribusikan melalui PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Malang, Jawa Timur, Senin (26/12). Petugas pos setempat mengatakan, pengiriman paket pos sejak sebulan terakhir mengalami peningkatan dari kisaran 6.000 paket menjadi sekitar 8.000 paket dan diperkirakan akan terus meningkat hingga Tahun Baru.

**BPR SUPRA**

**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## Belanja Perpajakan 2021 Dukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi

JAKARTA (IM) - Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) tahun 2021 yang menginventarisasi berbagai insentif perpajakan, baik dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, percepatan pemulihan ekonomi, maupun insentif perpajakan lain yang telah disediakan pemerintah untuk mendukung kinerja ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tema APBN 2021 “Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penguatan Reformasi”, insentif perpajakan diarahkan untuk memberikan bantalan bagi perekonomian serta mencegah kontraksi yang lebih dalam sekaligus mendukung percepatan pemulihan.

Secara umum, insentif pajak 2021 ditujukan untuk: (1) percepatan dan penguatan pengadaan kebutuhan medis penanganan pandemi, (2) relaksasi *cash flow* pelaku usaha yang masih terdampak pandemi, (3) mendorong percepatan pemulihan sektor potensial dan strategis, dan (4) implementasi keberlanjutan reformasi struktural dan percepatan transformasi perekonomian.

Peran insentif perpajakan tersebut cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif, bahkan mampu berada pada level 1,6 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan level pra-pandemi pada tahun 2019. Dukungan insentif fiskal baik yang berlaku secara umum, maupun yang ditawarkan melalui sektor-sektor strategis berperan sebagai stimulus bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional dari sisi produksi dan konsumsi.

Salah satu dukungan tersebut yaitu kebijakan PPNBM Ditanggung Pemerintah untuk pembelian Kendaraan Bermotor dan PPN Ditanggung Pemerintah atas pembelian rumah yang mampu mencapai tujuannya untuk menggerak-

kan sektor riil.

“Melihat perekonomian tahun 2020 terkontraksi dalam, Pemerintah memberikan insentif perpajakan yang lebih besar di tahun 2021 untuk mendorong pemulihan. Kebijakan insentif ini dilakukan dengan lebih terarah dan terukur untuk merespons kondisi pandemi yang dinamis serta mendukung upaya akselerasi transformasi ekonomi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu dikutip dari laman Kemkeu, Senin (26/12).

Laporan Belanja Perpajakan tahun 2021 menjadi dokumen penting untuk menginventarisasi dan mengevaluasi berbagai insentif perpajakan, serta menjadi dasar evaluasi kebijakan 2022 khususnya kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi.

Seiring dengan itu, Belanja Perpajakan tahun 2021 mencapai Rp299,1 triliun atau sebesar 1,76 persen dari PDB. Nilai tersebut meningkat 23,8 persen dibandingkan belanja perpajakan tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp241,6 triliun atau 1,56 persen dari PDB.

Berdasarkan jenis pajaknya, belanja perpajakan terbesar untuk tahun 2021 adalah PPN dan PPNBM, yang mencapai Rp175,0 triliun atau 58,5 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Jumlah ini meningkat 24,2 persen dibandingkan belanja perpajakan tahun 2020, seiring dengan pemanfaatan insentif dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 seperti fasilitas PPN dan Bea Masuk untuk kegiatan penanganan Covid-19 termasuk impor pengadaan vaksin.

Sementara pada tahun 2023, reformasi belanja APBN dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ● **hen**

## Zyrexindo Mandiri Bukukan Laba Rp22,47 Miliar

JAKARTA (IM) - PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) mengalami penurunan laba periode berjalan pada kinerja sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2022.

Produsen laptop Zyrex ini mengantongi laba Rp22,47 miliar, turun 48,18% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp43,38 miliar.

Sejalan dengan itu, angka penjualan bersih ZYRX hingga kuartal III 2022 juga turun sebesar 54,66% menjadi Rp188,32 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp415,41 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan di Keterbukaan BEI, Senin (26/12), penjualan perangkat komputasi portable tercatat sebesar Rp65,09 miliar.

Kemudian, penjualan produk IT tercatat sebesar Rp120,67 miliar, serta penjualan lainnya sebesar Rp25,55 miliar.

Di sisi lain, beban pokok penjualan tercatat sebesar Rp146,16 miliar. Kemudian, beban penjualan dan pema-

saran tercatat sebesar Rp4,15 miliar, serta beban umum dan administrasi sebesar Rp11,43 miliar.

Per September 2022, total nilai aset ZYRX tercatat sebesar Rp491,05 miliar, tumbuh 76,90% dari posisi akhir tahun lalu yang sebesar Rp277,57 miliar. Total liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp279 miliar dan ekuitas sebesar Rp212,04 miliar.

Hingga akhir tahun ini, perseroan menargetkan penjualan dapat mencapai Rp800 miliar, EBITDA sebesar Rp92 miliar, dan laba bersih sebesar Rp79 miliar.

Sedangkan di tahun 2023, perseroan memproyeksikan penjualan bisa mencapai Rp1 triliun.

Saat ini, ZYRX masih berfokus pada pasar domestik atau dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan perseroan akan menasar pasar ekspor jika memang permintaan atau demannya cukup baik, khususnya di negara-negara tetangga. ● **dot**